

	News Title : Pemerintah Kuatkan Regulasi dan Pembinaan Ekosistem Aset Kripto	
	Media Name : ninna.id	Journalist : Damayanti Sinaga
	Publish Date : 07 April 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Izin Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Pemerintah Kuatkan Regulasi dan Pembinaan Ekosistem Aset Kripto

07 April 2023



Photo: Nini Kurniawati

NINNA.ID Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menekankan, perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia didukung penguatan regulasi dan pembinaan ekosistem yang terus mengalami perbaikan. Hingga saat ini, Bappebti telah memberi izin 28 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto.

Dibuatkan oleh Didid dalam sambutan kunci dalam peluncuran aset PT Sentra Bihewe Indonesia di Indragiri Village, Jakarta pada Kamis 6 April 2023.

"Kasyarakat dapat bertransaksi aset kripto melalui 28 perusahaan yang telah mengantongi izin dari Bappebti. Sehingga, ini sudah jelas legalitasnya. Saya saat ini ke sini yang dapat dipertanggung-jawabkan, dan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022" jelas Didid.

Perusahaan calon pedagang aset fisik kripto yang telah terdaftar di Bappebti yaitu PT Indosat Nasional Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkah/Tokocrypto, PT Zapra Exchange Indonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Triu Kencana Saja, PT Luno Indonesia SD, PT Citra Koin Digital, PT Tiga Kiri Utama, dan PT Uptot Exchange Indonesia. Selanjutnya PT Pakejanga Dotcom Indonesia, PT Trindi Investama Berkah, PT Pakejanga Digital Aset, PT Global Koin Indonesia, PT Kripto Makina Koin, PT Mitra Kripto Sukses, PT Pantheras Teknologi Internasional, PT Aset Digital Indonesia, dan PT Pedagang Aset Kripto.

Kemudian PT Tumbuh Bersama Neno, PT Utama Aset Digital Indonesia, PT Cointit Digital Indonesia, PT Kapem Teknologi Indonesia, PT Bumi Bersama Comptech, PT Gunung Kripto Indonesia, PT Nuhwa Koin Nusantara, PT Sentra Bihewe Indonesia, PT CTIG Indonesia Berkarya, dan PT Cyamata Exchange Indonesia.

Dalam peluncuran aset PT Sentra Bihewe Indonesia yang merupakan koin aset berupa komoditi, Bappebti melakukan dukungan pemerintah terhadap industri kripto. Diungkapkan PT Sentra Bihewe Indonesia dapat melayani nasabah pada Mei 2023 mendatang.

Didid menambahkan, Bappebti merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelompokan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Rasi Gunung (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Indonesia.

Perdagangan fisik aset kripto menjadi salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang diawasi Bappebti. Hal ini berlaku sejak diukulkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

"Perdagangan berjangka merupakan **derivat** yang saat ini berkembang, sangat kompleks dan memiliki *offet high risk* high return sehingga diperlukan tata kelola dan pengawasan yang baik. Perdagangan berjangka juga perlu diatur dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal serta memberi kapabilitas hukum dan kepastian berusaha bagi semua pihak yang terlibat" jelas Didid.

UPDATE 80 Peran Rantai Rantai di Indonesia Pura Rantai Rantai

Menurut Didid, kemajuan teknologi rantai blok (*blockchain*) aset kripto dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan. Untuk itu, pada tahun ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Kemudian UU PPSK ini memiliki tujuan yang *forward looking*, mengantisipasi risiko masa depan, perlindungan konsumen/investor.

Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam UU ini antara lain penguatan kelembagaan sektor keuangan, penguatan tata kelola keuangan, dukungan pembinaan pengembangan yang berkeadilan, perlindungan, konsumen, serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran Bappebti dalam tata kelola perdagangan aset kripto akan berwujud menjadi kewewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 2 tahun.

Melihat posisi aset kripto yang terus meningkat serta perkembangan kripto saat ini pada 2024, pemerintah harus optimis perdagangan aset kripto akan semakin berkembang.

Melalui UU PPSK, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.

"Masih berkaitan dengan UU PPSK, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka persiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai amatan UU Nomor 4 Tahun 2023. Penyusunan RPP khususnya terkait masa transisi pengalihan pengawasan derivatif keuangan dan aset kripto" ungkap Didid.



Photo: Nini Kurniawati

Perkembangan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia

Dinamika perdagangan fisik aset kripto mengalami pasang surut sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini berlaku pada 2022 sempat menurun, namun pada Februari 2023 tercatat Rp15,8 triliun atau naik 5,1 persen dibandingkan Januari 2023 (H4M).

Secara total, nilai transaksi periode Januari–Februari 2023 sebesar Rp25,94 triliun atau turun 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 sebesar Rp43,76 triliun. Lima jenis aset kripto dengan nilai transaksi terbesar saat ini yaitu tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), dan Terra (LUNA).

Awal 2022 dan diperkirakan sampai dengan 2023, dunia masih mengalami fase kripto winter. Artinya, penurunan transaksi perdagangan aset kripto terjadi hampir sepanjang tahun.

Namun sebaliknya, dari sisi jumlah pedagang, terjadi penambahan cukup signifikan. Pada Februari 2023, tercatat jumlah pedagang 17 juta (rata-rata pertumbuhan sebesar 500 ribu pedagang per bulan) dan tahun sebelumnya sebesar 5 juta.

Dari sisi penguatan ekonomi nasional, perdagangan aset kripto memberikan manfaat terutama melalui kontribusinya dalam penerimaan negara melalui pajak. Pada periode Mei–Desember 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, telah terkumpul pajak atas perdagangan fisik aset kripto sebesar Rp246,5 miliar.